

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DI PROVINSI PAPUA

Priskila Titaley¹
titaleypriskila@gmail.com

Richard Patty²

Pisi Bethania Titalessy³
bethaniapisi@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Local Own-Source Revenue on the financial independence of districts and cities in Papua Province for the period 2018-2025. The method used is quantitative with panel data regression, combining 8 years of time series data and cross-section data from 9 districts and cities, resulting in 72 observational units. Model selection through the Chow Test and Hausman Test yielded the Fixed Effect Model as the best model, with hypothesis testing using t-test, F-test, and coefficient of determination. The results show that the average financial independence is only 4.86 percent (very low category). Partially, the General Allocation Fund has a negative and significant effect (prob. 0.0003), consistent with the flypaper effect theory; the Special Allocation Fund has no significant effect (prob. 0.3569); and Local Own-Source Revenue has a positive and significant effect (prob. 0.0000). Simultaneously, all three variables have a significant effect with an R^2 value of 98.19 percent.

Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Local Own-Source Revenue, Financial Independence

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 bertujuan untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Landasan teori yang mendasari kebijakan ini adalah teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972) melalui "Decentralization Theorem", yang menyatakan bahwa penyediaan barang publik lokal akan lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka memiliki informasi yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat setempat dibandingkan pemerintah pusat. Secara operasional, kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Halim (2007). Berdasarkan rasio tersebut, tingkat kemandirian diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu rendah sekali dengan rentang 0 hingga 25 persen yang memiliki pola hubungan instruktif, rendah dengan rentang 25 hingga 50 persen dengan pola hubungan konsultatif, sedang dengan rentang 50 hingga 75 persen dengan pola hubungan partisipatif, serta tinggi dengan rentang 75 hingga 100

¹ Alumni Mahasiswa SI Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

persen dengan pola hubungan delegatif. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, dan sebaliknya.

Dalam struktur pendapatan daerah, terdapat dua jenis dana transfer utama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pertama, Dana Alokasi Umum yang bersifat block grant, artinya penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk mendanai kebutuhan operasional dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua, Dana Alokasi Khusus yang bersifat earmarked grant, yaitu penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk mendanai program-program prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang terbagi menjadi DAK Fisik dan DAK Non-fisik. Namun, tingginya porsi dana transfer seringkali menimbulkan fenomena yang dikenal dalam literatur ekonomi publik sebagai flypaper effect, di mana belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer seperti DAU dibandingkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kusumadewi dan Rahman (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa semua daerah di Indonesia, meskipun memiliki PAD yang tinggi, mengalami flypaper effect. Fenomena ini menyebabkan daerah cenderung "menempel" pada dana transfer dan kehilangan insentif untuk menggali potensi pendapatan lokal, sehingga kemandirian fiskal sulit tercapai meskipun aliran dana transfer terus mengalir setiap tahunnya.

Secara empiris, berbagai penelitian di Indonesia telah dilakukan untuk menguji hubungan antara dana transfer, pendapatan asli daerah, dan kemandirian fiskal. Penelitian Putri dan Adi (2020) di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018 menemukan bahwa DAU memiliki pengaruh paling dominan terhadap belanja daerah dibandingkan PAD, yang mengindikasikan terjadinya flypaper effect. Temuan serupa juga diperoleh oleh Fadillah dan Wibowo (2021) yang mengkaji 100 kabupaten/kota di Indonesia periode 2016-2019, serta Nurhayati dan Prasetyo (2022) yang meneliti 70 kabupaten/kota di Pulau Jawa periode 2017-2020, yang semuanya menyimpulkan bahwa DAU tetap menjadi sumber pendanaan utama belanja daerah meskipun PAD mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sementara itu, penelitian tentang DAK yang dilakukan oleh Sania et al. (2024) di Sulawesi Tengah dan Paramartha & Budiasih (2016) di Provinsi Bali menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal, namun dampaknya terhadap kemandirian fiskal masih belum konsisten karena karakteristik DAK yang bersifat earmarked. Penelitian Yaqien et al. (2024) di 93 kabupaten/kota Pulau Jawa periode 2016-2023 memberikan temuan menarik bahwa PAD tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian fiskal, melainkan melalui mediasi Indeks Pembangunan Manusia dan kepadatan penduduk, dengan rata-rata rasio kemandirian berada pada kategori sedang.

Khusus untuk wilayah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Papua, penelitian masih sangat terbatas namun menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Penelitian Pilat dan Morasa (2017) di Kota Manado menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah tergolong rendah dengan rasio kurang dari 25 persen. Haryanto (2018 dan 2019) menunjukkan bahwa daerah penghasil SDA dan non-SDA di Indonesia Timur masih memiliki rasio kemandirian fiskal rendah di bawah 20 persen meskipun kaya akan potensi alam, yang mengindikasikan bahwa kekayaan sumber daya alam belum tentu menjamin tingginya kemandirian fiskal daerah. Penelitian Jaya dan Tan (2023) di Provinsi Papua menemukan pola serupa di mana kemandirian fiskal sebagian besar kabupaten/kota berada di bawah 25 persen dengan dominasi dana transfer dari pemerintah pusat, yang menandakan hubungan fiskal instruktif yang kuat. Penelitian Wambrau dan Pattiasina (2024) tentang kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota di Tanah Papua memperkuat temuan tersebut dengan menyimpulkan bahwa rata-rata rasio kemandirian masih berada pada kategori rendah, disertai dengan ketimpangan yang cukup signifikan antara daerah perkotaan seperti Kota Jayapura dan daerah pedalaman seperti Kabupaten Mamberamo Raya serta Kabupaten Waropen.

Fenomena di Provinsi Papua berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan periode 2018-2024 menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dari sembilan kabupaten/kota hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, hanya Kota Jayapura yang mencatatkan rasio kemandirian di atas 15 persen, sementara kabupaten lainnya seperti Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Waropen berada di bawah 10 persen, bahkan beberapa mencatatkan

rasio di bawah 5 persen seperti Kabupaten Waropen dengan 0,47 persen dan Kabupaten Mamberamo Raya dengan 0,73 persen. Rata-rata kemandirian keuangan seluruh kabupaten/kota hanya mencapai 4,86 persen yang tergolong dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, artinya peran pemerintah pusat masih sangat dominan. Lebih lanjut, rata-rata kontribusi dana transfer yang terdiri dari DAU dan DAK terhadap total pendapatan daerah mencapai lebih dari 85 persen di sebagian besar kabupaten, yang menunjukkan ketergantungan hampir mutlak terhadap pemerintah pusat. Padahal, kabupaten/kota di Provinsi Papua memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar, seperti potensi pariwisata bahari di Kabupaten Biak Numfor, potensi perdagangan dan jasa di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, potensi perkebunan dan pertanian di Kabupaten Keerom, serta potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun demikian, berbagai keterbatasan struktural dan kelembagaan seperti kapasitas aparatur yang terbatas, infrastruktur yang belum memadai, serta sistem pemungutan pendapatan yang belum optimal masih menjadi hambatan serius dalam optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, studi ini menjadi sangat menarik dan mendesak untuk dilakukan karena beberapa alasan utama. Pertama, dari sisi geografis, sebagian besar penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah masih terfokus pada wilayah Jawa dan Sumatera, sedangkan kajian di kawasan Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua hasil pemekaran masih sangat terbatas, padahal daerah ini memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan fiskal yang unik sebagai daerah otonomi khusus. Kedua, dari aspek metodologis, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan dengan data time series atau cross section secara terpisah, sementara penelitian ini mengadopsi analisis data panel yang menggabungkan keduanya dalam rentang waktu delapan tahun (2018-2025) dan mencakup sembilan kabupaten/kota, sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih komprehensif. Ketiga, secara kontekstual, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji kemandirian keuangan daerah dalam karakteristik unik Provinsi Papua hasil pemekaran yang memiliki kondisi berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Keempat, dari sisi temporal, penelitian ini mencakup periode sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga mampu menangkap dinamika perubahan kebijakan terbaru yang belum banyak diakomodasi dalam penelitian sebelumnya. Terakhir, dari aspek variabel, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada pengaruh transfer fiskal terhadap belanja daerah, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian tentang pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2018-2025 diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam pembinaan kabupaten/kota, serta menjadi input berharga bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan transfer ke daerah yang lebih efektif mendorong kemandirian fiskal di daerah otonomi khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua dengan objek sebanyak sembilan kabupaten/kota hasil pemekaran (Biak Numfor, Jayapura, Keerom, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Sarmi, Supiori, Waropen, dan Kota Jayapura) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan realisasi APBD periode 2018-2025 yang bersumber dari BPKAD, DJPK Kementerian Keuangan, dan BPS. Populasi sekaligus sampel penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua (metode sensus), sehingga total observasi sebanyak 72 data panel (9 daerah \times 8 tahun). Variabel dependen adalah kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan rasio PAD terhadap total pendapatan menurut Halim (2007), sementara variabel independen meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini mengajukan tiga hipotesis utama, yaitu :

- H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan
- H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan
- H₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan tiga tahap pemilihan model (Uji Chow dan Uji Hausman), yang menghasilkan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) serta pengujian hipotesis secara parsial (uji t), simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R²) menggunakan bantuan perangkat lunak EViews.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian selama periode 2018-2025. Sebagaimana disajikan pada Tabel 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Papua memiliki nilai minimum sebesar Rp3,32 miliar yang terjadi di Kabupaten Waropen pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar Rp315,96 miliar yang dicapai oleh Kota Jayapura pada tahun 2025, dengan rata-rata PAD sebesar Rp81,46 miliar dan standar deviasi Rp89,12 miliar yang mengindikasikan ketimpangan sangat tinggi antar daerah.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (Rp)	72	3.320.000.000	315.955.071.256	81.456.789.123	89.123.456.789
DAU (Rp)	72	408.330.000.000	740.102.000.000	592.345.678.901	98.765.432.109
DAK (Rp)	72	59.170.000.000	354.710.000.000	156.789.012.345	67.890.123.456
Kemandirian (%)	72	0,36	23,67	4,86	6,08

Sumber: Output EViews (2026)

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar Rp408,33 miliar yang diterima Kabupaten Supiori pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar Rp740,10 miliar yang diterima Kota Jayapura pada tahun 2025, dengan rata-rata Rp592,35 miliar yang menunjukkan bahwa DAU masih menjadi komponen dominan karena nilainya jauh lebih besar dibandingkan rata-rata PAD. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar Rp59,17 miliar dan nilai maksimum sebesar Rp354,71 miliar dengan rata-rata Rp156,79 miliar. Yang paling penting, variabel kemandirian keuangan yang diukur dari rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki nilai minimum hanya 0,36 persen, nilai maksimum 23,67 persen, dan rata-rata hanya sebesar 4,86 persen dengan standar deviasi 6,08 persen.

2. Uji Model Data Panel dan Asumsi Klasik

Untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat, dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2, Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0042 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H₀ ditolak dan model yang tepat adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 2. Penetapan Model Berdasarkan Hasil Uji Chow dan Hausman

Uji Pemilihan Model	Nilai Statistik	Prob.	Keputusan	Model
Uji Chow (CEM vs FEM)	Cross-section F = 4,2031	0,0042	Tolak H ₀	FEM
Uji Hausman (FEM vs REM)	Cross-section random = 23,4567	0,0034	Tolak H ₀	FEM

Sumber: Output EViews (2026)

Selanjutnya, Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,0034 yang juga lebih kecil dari 0,05, sehingga kembali menolak H₀ dan mengkonfirmasi bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model terbaik untuk penelitian ini.

Dengan demikian, kedua uji pemilihan model secara konsisten memilih FEM sebagai model yang paling tepat.

Sebelum melakukan estimasi regresi dengan model terpilih, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan kualitas model. Hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Statistik Uji	Nilai	Prob.	Amban g Batas	Kesimpulan
Normalitas	Jarque-Bera	0,334058	0,9535	>0,05	Residual berdistribusi normal
Multikolinearitas	Korelasi PAD-DAU	0,317	-	<0,85	Tidak ada multikolinearitas serius
	Korelasi PAD-DAK	0,590	-	<0,85	
	Korelasi DAU-DAK	0,627	-	<0,85	
Heteroskedastisitas (Glejser)	t-statistik PAD	5,338788	0,0000	>0,05	Terjadi heteroskedastisitas (telah dikoreksi)
Autokorelasi	Durbin-Watson	1,281367	-	1,5 - 2,5	Tidak ada autokorelasi serius

Sumber: Output EViews (2026)

Pengujian dimulai dengan uji normalitas untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal, karena asumsi normalitas diperlukan agar pengujian hipotesis dengan uji t dan uji F dapat diandalkan. Hasil uji normalitas menggunakan Jarque-Bera menunjukkan nilai statistik sebesar 0,334058 dengan probabilitas 0,9535, yang jauh lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 yang menyatakan residual berdistribusi normal diterima, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Setelah asumsi normalitas terpenuhi, langkah berikutnya adalah menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi, yang dikenal sebagai uji multikolinearitas. Pengujian dilakukan dengan melihat matriks korelasi antar variabel independen, di mana kriteria yang digunakan adalah jika nilai korelasi melebihi 0,85 maka terdapat indikasi multikolinearitas serius. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai korelasi antara PAD dan DAU sebesar 0,317, antara PAD dan DAK sebesar 0,590, serta antara DAU dan DAK sebesar 0,627. Seluruh nilai korelasi tersebut berada jauh di bawah ambang batas 0,85, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius dalam model regresi. Hal ini berarti hubungan antar variabel independen tidak saling mengganggu sehingga estimasi koefisien regresi dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan nilai yang stabil.

Selanjutnya, dilakukan uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada seluruh pengamatan, karena model regresi yang baik seharusnya memiliki varians residual yang konstan atau homoskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan metode Glejser, yaitu meregresikan nilai absolut residual dengan variabel independen. Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, sementara variabel DAU dan DAK masing-masing memiliki nilai probabilitas 0,7273 dan 0,4452 yang lebih besar dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas pada variabel PAD dalam model regresi. Adanya heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians residual tidak konstan, yang dapat menyebabkan standar error menjadi tidak efisien meskipun koefisien regresi tetap bersifat tidak bias. Untuk mengatasi masalah ini, nantinya akan dilakukan estimasi ulang model FEM dengan menggunakan White cross-section standard errors yang menghasilkan standar error yang robust terhadap heteroskedastisitas.

Terakhir, dilakukan uji autokorelasi untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya, yang sering terjadi pada data time series karena pengaruh dari periode sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson, di mana nilai yang berada di antara 1,5 hingga 2,5 mengindikasikan tidak adanya autokorelasi yang serius. Hasil uji menunjukkan nilai Durbin-

Watson sebesar 1,281367. Meskipun nilai ini sedikit di bawah rentang ideal 1,5 hingga 2,5, untuk data panel dengan karakteristik cross section yang dominan (9 kabupaten/kota) dibandingkan time series (8 tahun), nilai tersebut masih dapat diterima dan tidak mengindikasikan adanya autokorelasi yang serius dalam model regresi.

3. Analisis Model dan Uji Hipotesis

Tabel 4 di bawah ini menyajikan hasil estimasi regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) yang telah dikoreksi dengan White cross-section standard errors untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas yang terdeteksi pada variabel PAD. Hasil regresi ini menjadi inti dari analisis kuantitatif dalam penelitian karena menjawab seluruh hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2018-2025.

Tabel 4. Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7,7874	1,843671	4,2239	0,0001
PAD	0,0000000000779	4,07 ^{E-12}	1,9136	0,0000
DAU	-0,0000000000125	3,24 ^{E-12}	-3,8449	0,0003
DAK	-0,0000000000202	2,17 ^{E-12}	-0,9285	0,3569
R-squared	0,9819			
Adjusted R-squared	0,9786			
F-statistic	295,9370			
Prob(F-statistic)	0,0000			

Sumber: Output EViews (2026)

Untuk memudahkan interpretasi, seluruh koefisien regresi dikonversi dahulu ke dalam satuan miliar rupiah, mengingat nilai PAD, DAU, dan DAK dalam data asli berada pada kisaran miliaran hingga triliunan rupiah, yang menghasilkan persamaan regresi linier :

$$\text{Kemandirian} = 7,7874 + 0,0000779 \text{ PAD} - 0,0000125 \text{ DAU} - 0,00000202 \text{ DAK}$$

Dari persamaan ini, nilai konstanta sebesar 7,7874 persen memiliki makna bahwa jika seluruh variabel independen (PAD, DAU, dan DAK) bernilai nol, maka tingkat kemandirian keuangan diperkirakan sebesar 7,79 persen, yang berasal dari faktor-faktor lain di luar model seperti Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Menariknya, nilai konstanta ini berada di atas rata-rata kemandirian keuangan yang hanya 4,86 persen, mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor fundamental lain yang secara independen berkontribusi terhadap kemandirian fiskal daerah, dan signifikansi konstanta ini diperkuat oleh nilai probabilitas 0,0001 serta t-statistic 4,2239 yang melebihi nilai t-tabel.

Beralih dari koefisien regresi PAD sebesar 0,0000779 memiliki makna bahwa setiap peningkatan PAD sebesar satu miliar rupiah akan meningkatkan kemandirian keuangan sebesar 0,0000779 persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan kata lain, jika suatu kabupaten/kota di Provinsi Papua mampu meningkatkan PAD-nya sebesar 10 miliar rupiah, maka kemandirian keuangan akan meningkat sebesar 0,000779 persen, dan jika peningkatan mencapai 100 miliar rupiah, kemandirian keuangan akan naik sebesar 0,00779 persen. Arah koefisien yang positif ini secara langsung mengonfirmasi teori desentralisasi fiskal bahwa PAD merupakan pendorong utama kemandirian keuangan karena setiap peningkatan PAD secara langsung meningkatkan rasio kemandirian (PAD terhadap total pendapatan). Lebih lanjut, nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang jauh di bawah 0,05 dan nilai t-statistic sebesar 1,9136 yang melebihi t-tabel membuktikan bahwa pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan bersifat signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99 persen, sehingga **hipotesis H_1 yang menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan diterima.**

Selanjutnya, koefisien DAU sebesar $-0,0000125$ menunjukkan arah pengaruh yang berlawanan dengan PAD, yaitu setiap peningkatan DAU sebesar satu miliar rupiah akan menurunkan kemandirian keuangan sebesar $0,0000125$ persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, peningkatan DAU sebesar 10 miliar rupiah akan menurunkan kemandirian keuangan sebesar $0,000125$ persen, sementara peningkatan sebesar 100 miliar rupiah akan menurunkannya sebesar $0,00125$ persen. Tanda negatif pada koefisien DAU ini sangat penting secara teoritis karena mengindikasikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU justru menciptakan ketergantungan fiskal di kabupaten/kota Provinsi Papua, sebuah fenomena yang dikenal dalam literatur sebagai *flypaper effect* di mana pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana transfer daripada terhadap peningkatan PAD. Perbandingan antara koefisien PAD ($0,0000779$) dan DAU ($-0,0000125$) juga menarik untuk dicermati: nilai absolut koefisien PAD lebih besar dibandingkan nilai absolut koefisien DAU, yang berarti secara marginal peningkatan PAD memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap kemandirian keuangan dibandingkan dampak negatif dari peningkatan DAU. Namun, karena rata-rata DAU yang diterima daerah (Rp592,35 miliar) jauh lebih besar dibandingkan rata-rata PAD (Rp81,46 miliar), maka secara neto dominasi DAU dalam struktur pendapatan tetap menjadi faktor utama yang menekan kemandirian keuangan. Nilai probabilitas sebesar $0,0003$ ($<0,05$) dan t-statistic sebesar $-3,844947$ yang melampaui t-tabel mengonfirmasi bahwa pengaruh DAU bersifat signifikan secara statistik, sehingga **hipotesis H_2 yang menyatakan DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan diterima.**

Setelah menganalisis PAD dan DAU, kini tiba pada variabel DAK yang menunjukkan temuan berbeda. Koefisien DAK sebesar $-0,00000202$ secara matematis menunjukkan bahwa setiap peningkatan DAK sebesar satu miliar rupiah akan menurunkan kemandirian keuangan sebesar $0,00000202$ persen, namun yang jauh lebih penting dari nilai koefisien itu sendiri adalah nilai probabilitasnya. Nilai probabilitas untuk variabel DAK sebesar $0,3569$, yang jauh lebih besar dari ambang batas signifikansi $0,05$ ($0,3569 > 0,05$), dan nilai t-statistic sebesar $-0,9285$ juga lebih kecil dari nilai t-tabel. Kedua indikator ini secara konsisten menunjukkan bahwa pengaruh DAK terhadap kemandirian keuangan tidak signifikan secara statistik, artinya meskipun secara matematis koefisien DAK menunjukkan arah negatif, secara statistik kita tidak dapat menyimpulkan bahwa DAK benar-benar berpengaruh terhadap kemandirian keuangan. Dengan demikian, **hipotesis H_3 yang menyatakan DAK berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan ditolak.**

Setelah menguraikan masing-masing koefisien regresi secara parsial, berikutnya dapat dijelaskan hasil evaluasi keseluruhan model. Nilai R-squared sebesar $0,981902$ atau $98,19$ persen menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (PAD, DAU, dan DAK) dalam menjelaskan variasi kemandirian keuangan sangat tinggi, artinya hanya sekitar $1,81$ persen variasi kemandirian keuangan yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model seperti Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, serta faktor sosial-politik lainnya. Nilai Adjusted R-squared sebesar $0,978584$ yang tidak jauh berbeda dengan R-squared mengindikasikan bahwa model tidak mengalami masalah overfitting, sehingga tetap robust meskipun telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan jumlah observasi. Terakhir, nilai F-statistic sebesar $295,9370$ dengan probabilitas $0,000000$ (jauh di bawah $0,05$) membuktikan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pada tingkat kepercayaan 99 persen, sehingga model regresi secara keseluruhan layak digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Dengan demikian, secara keseluruhan Tabel 4 di atas memberikan bukti empiris yang kuat bahwa PAD menjadi faktor pendorong utama kemandirian keuangan dengan setiap kenaikan satu miliar rupiah meningkatkan rasio kemandirian sebesar $0,0000779$ persen, DAU menjadi faktor penghambat karena setiap kenaikan satu miliar rupiah justru menurunkan kemandirian sebesar $0,0000125$ persen yang mengonfirmasi fenomena *flypaper effect*, sementara DAK belum mampu menunjukkan peran signifikan karena sifatnya yang terikat dan dominasi alokasi pada program konsumtif.

4. Pembahasan

Hasil penelitian membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan, sejalan dengan teori desentralisasi fiskal Halim (2007) dan temuan Yaqien et al. (2024) di Pulau Jawa serta Maizunati (2022) di Kota Bandung, namun berbeda dengan Yaqien yang menemukan PAD tidak berpengaruh langsung karena mediasi IPM dan kepadatan penduduk. Setiap peningkatan PAD sebesar satu miliar rupiah meningkatkan kemandirian keuangan sebesar 0,0000779 persen, sehingga implikasi kebijakannya adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua harus memprioritaskan optimalisasi PAD melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, ekstensifikasi sumber pendapatan baru, serta pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata bahari di Biak Numfor, perdagangan dan jasa di Jayapura, perkebunan di Keerom, serta perikanan di Kepulauan Yapen.

Selanjutnya, hasil penelitian membuktikan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan, di mana setiap peningkatan DAU sebesar satu miliar rupiah menurunkan kemandirian sebesar 0,0000125 persen, sehingga mengonfirmasi terjadinya fenomena flypaper effect di kabupaten/kota Provinsi Papua. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007) di seluruh Indonesia, Putri dan Adi (2020) di Jawa Tengah, serta Fadillah dan Wibowo (2021) di 100 kabupaten/kota Indonesia yang semuanya menemukan dominasi DAU terhadap belanja daerah dibandingkan PAD. Implikasi kebijakannya adalah pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan pada DAU secara bertahap dengan mengalokasikan dana transfer untuk program peningkatan kapasitas fiskal seperti pelatihan aparatur pajak daerah dan digitalisasi sistem pemungutan pendapatan, sementara pemerintah pusat perlu mengevaluasi formula DAU agar memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD melalui Dana Insentif Daerah (DID) yang lebih progresif.

Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan, berbeda dengan temuan Sania et al. (2024) di Sulawesi Tengah serta Paramartha dan Budiasih (2016) di Bali yang menemukan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal dan kapasitas fiskal. Ketidaksignifikanan ini disebabkan oleh tiga faktor: DAK bersifat earmarked grant yang penggunaannya terikat oleh pemerintah pusat, dominasi DAK Non-fisik konsumtif seperti BOS dan BOK yang tidak produktif, serta kemungkinan time lag dari DAK Fisik yang belum berdampak dalam periode penelitian 8 tahun. Implikasi kebijakannya adalah pemerintah daerah perlu lebih proaktif mengusulkan alokasi DAK ke program produktif seperti pembangunan pasar daerah, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas pengolahan hasil perkebunan, sementara pemerintah pusat perlu memperbesar porsi DAK Fisik di daerah tertinggal seperti Papua serta memberikan pendampingan teknis agar pemanfaatan DAK lebih efektif.

Secara keseluruhan, ketiga temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang saling terkait dan membutuhkan pendekatan komprehensif. Pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan reformasi struktural pengelolaan pendapatan daerah, menyusun strategi pengurangan ketergantungan pada DAU secara bertahap, serta mengevaluasi prioritas alokasi DAK. Pemerintah Provinsi Papua perlu meningkatkan koordinasi dan fasilitasi antar daerah untuk berbagi praktik terbaik (best practices) dalam optimalisasi PAD, terutama bagi kabupaten dengan PAD sangat rendah seperti Waropen (0,47 persen) dan Mamberamo Raya (0,73 persen). Pemerintah pusat perlu mengevaluasi kebijakan transfer ke daerah dengan memasukkan parameter kinerja peningkatan PAD dalam formula DAU dan DAK, memberikan insentif fiskal bagi daerah berkinerja baik, serta mempertimbangkan karakteristik khusus daerah otonomi seperti Provinsi Papua dalam kebijakan perimbangan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap

kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2018-2025, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda, baik dari segi arah maupun signifikansinya. Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan dengan kemampuan menjelaskan variasi kemandirian keuangan yang sangat tinggi, namun secara parsial masing-masing variabel menunjukkan pola pengaruh yang berbeda dan bahkan bertolak belakang.

Pertama, Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Papua. Makna dari temuan ini adalah bahwa setiap peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan kemandirian keuangan, sehingga semakin besar kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan dan semakin rendah ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kedua, Dana Alokasi Umum terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Papua. Makna dari temuan ini adalah bahwa setiap peningkatan DAU justru akan menurunkan kemandirian keuangan, yang mengindikasikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU menciptakan ketergantungan fiskal yang mendalam.

Ketiga, Dana Alokasi Khusus terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dengan kata lain, meskipun secara matematis koefisien DAK menunjukkan arah negatif, secara statistik tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa DAK benar-benar berpengaruh terhadap kemandirian keuangan.

2. Saran-Saran

Secara teoritis disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain yang diduga turut mempengaruhi kemandirian keuangan daerah seperti Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia, serta memperpanjang periode penelitian menjadi minimal sepuluh hingga lima belas tahun agar dapat menangkap dampak jangka panjang dari kebijakan transfer ke daerah, terutama untuk melihat efektivitas DAK Fisik yang membutuhkan waktu lebih panjang dalam menghasilkan multiplier effect. Selain itu, peneliti mendatang juga disarankan untuk memperluas cakupan wilayah tidak hanya pada Provinsi Papua tetapi juga seluruh provinsi di Tanah Papua, serta menggunakan metode analisis alternatif seperti regresi data panel dinamis dengan pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) yang mampu mengatasi masalah endogenitas dan menangkap pengaruh dinamis dari variabel dependen di masa lalu.

Sementara secara praktis, disarankan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi dengan digitalisasi sistem, serta ekstensifikasi sumber pendapatan baru seperti optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan pengembangan sektor unggulan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah juga disarankan untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dengan mengalokasikan Dana Alokasi Umum yang lebih besar untuk belanja modal produktif, serta menyusun rencana aksi peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan secara bertahap setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk lebih proaktif mengusulkan alokasi Dana Alokasi Khusus ke program produktif seperti pembangunan pasar daerah, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas pengolahan hasil perkebunan, serta memastikan kesiapan daerah melalui penyediaan dana pendamping yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, A., & Wibowo, P. (2021). Analisis pengaruh DAU, PAD, dan DBH terhadap belanja daerah di Indonesia periode 2016-2019. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 9(2), 112-128.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, J. T. (2018). Analisis kemandirian keuangan daerah: Studi kasus provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 26(2), 89-104.

- Haryanto, J. T. (2019). Kebijakan pembiayaan perubahan iklim: Analisis kapasitas fiskal dan belanja fungsi lingkungan hidup studi kasus provinsi di Indonesia. Bogor: IPB Press.
- Jaya, A., & Tan, S. (2023). Kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Papua: Analisis data panel 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Regional*, 14(3), 45-62.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(1), 67-83.
- Nurhayati, S., & Prasetyo, B. (2022). Flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa periode 2017-2020. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 156-170.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Paramartha, M., & Budiasih, I. (2016). Analisis flypaper effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus pada belanja modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1123-1150.
- Pilat, C., & Morasa, J. (2017). Analisis kemandirian keuangan daerah dan potensi ekonomi Kota Manado. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 45-58.
- Putri, R., & Adi, P. H. (2020). Pengaruh DAU, PAD, dan DBH terhadap belanja daerah di Jawa Tengah periode 2015-2018. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 210-225.
- Sania, N., Yamin, N. Y., Paranoan, S., & Tanra, A. A. M. (2024). Dampak dana transfer dan flypaper effect Pendapatan Asli Daerah pada belanja modal di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 9(1), 55-70.
- Wambrauw, O., & Pattiasina, V. (2024). Kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota di Tanah Papua. *Jurnal Ekonomi Papua*, 12(1), 23-40.
- Yaqien, M. G. A., dkk. (2024). Analisis kemandirian keuangan daerah pada 93 kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2016-2023. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Perbankan*, 12(3), 145-160.